

Lampiran 1
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE- /PJ/2009
 Tanggal : Juni 2009
 Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
 Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR SATKER KOORDINATOR REKONSILIASI TINGKAT UAPPA-W			
NO.	KANWIL DIP	SATKER KOORDINATOR	KANWIL DIPB
1.	Kanwil DIP Nangroe Aceh Darussalam	Satker Kanwil DIP Nangroe Aceh Darussalam	Kanwil : Banda Aceh
2.	Kanwil DIP Sumatera Utara I	Satker Kanwil DIP Sumatera Utara I	Kanwil II Medan
3.	Kanwil DIP Sumatera Utara II	Satker Kanwil DIP Sumatera Utara II	Kanwil II Medan
4.	Kanwil DIP Riau dan Kep. Riau	Satker Kanwil DIP Riau dan Kep. Riau	Kanwil IV Pekanbaru
5.	Kanwil DIP Sumatera Barat dan Jambi	Satker Kanwil DIP Sumatera Barat dan Jambi	Kanwil III Padang
		Satker KPP Pratama Jambi	Kanwil V Jambi
6.	Kanwil DIP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka	Satker Kanwil DIP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka	Kanwil VI Palembang
		Satker KPP Pratama Pangkal Pinang	Kanwil IX Pangkal Pinang
7.	Kanwil DIP Bengkulu dan Lampung	Satker Kanwil DIP Bengkulu dan Lampung	Kanwil VII Bandar Lampung
		Satker KPP Pratama Bengkulu	Kanwil VIII Bengkulu
8.	Kanwil DIP Jakarta Pusat	Satker Kanwil DIP Jakarta Pusat	Kanwil XI Jakarta
9.	Kanwil DIP Jakarta Barat	Satker Kanwil DIP Jakarta Barat	Kanwil XI Jakarta
10.	Kanwil DIP Jakarta Selatan	Satker Kanwil DIP Jakarta Selatan	Kanwil XI Jakarta
11.	Kanwil DIP Jakarta Timur	Satker Kanwil DIP Jakarta Timur	Kanwil XI Jakarta
12.	Kanwil DIP Jakarta Utara	Satker Kanwil DIP Jakarta Utara	Kanwil XI Jakarta
13.	Kanwil DIP Jakarta Khusus	Satker Kanwil DIP Jakarta Khusus	Kanwil XI Jakarta
14.	Kanwil DIP Banten	Satker Kanwil DIP Banten	Kanwil X Serang
15.	Kanwil DIP Jawa Barat I	Satker Kanwil DIP Jawa Barat I	Kanwil XII Bandung
16.	Kanwil DIP Jawa Barat II	Satker Kanwil DIP Jawa Barat II	Kanwil XII Bandung
17.	Kanwil DIP Jawa Tengah I	Satker Kanwil DIP Jawa Tengah I	Kanwil XIII Semarang
18.	Kanwil DIP Jawa Tengah II	Satker Kanwil DIP Jawa Tengah II	Kanwil XIII Semarang
19.	Kanwil DIP Daerah Istimewa Yogyakarta	Satker Kanwil DIP Daerah Istimewa Yogyakarta	Kanwil XIV Yogyakarta
20.	Kanwil DIP Jawa Timur I	Satker Kanwil DIP Jawa Timur I	Kanwil XV Surabaya
21.	Kanwil DIP Jawa Timur II	Satker Kanwil DIP Jawa Timur II	Kanwil XV Surabaya
22.	Kanwil DIP Jawa Timur III	Satker Kanwil DIP Jawa Timur III	Kanwil XV Surabaya
23.	Kanwil DIP Kalimantan Barat	Satker Kanwil DIP Kalimantan Barat	Kanwil XVI Pontianak
24.	Kanwil DIP Kalimantan Selatan dan Tengah	Satker Kanwil DIP Kalimantan Selatan dan Tengah	Kanwil XVII Banjarmasin
		Satker KPP Pratama Palangkaraya	Kanwil XVII Palangkaraya
25.	Kanwil DIP Kalimantan Timur	Satker Kanwil DIP Kalimantan Timur	Kanwil XVIII Samarinda
26.	Kanwil DIP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	Satker Kanwil DIP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	Kanwil XIX Makassar
		Satker KPP Pratama Kendari	Kanwil XX Kendari
27.	Kanwil DIP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Satker Kanwil DIP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	Kanwil XXVII Manado
		Satker KPP Pratama Palu	Kanwil XXIV Palu
		Satker KPP Pratama Gorontalo	Kanwil XXVI Gorontalo
		Satker KPP Pratama Ternate	Kanwil XXVIII Ternate
28.	Kanwil DIP Bali	Satker Kanwil DIP Bali	Kanwil XX Denpasar
29.	Kanwil DIP Nusa Tenggara	Satker Kanwil DIP Nusa Tenggara	Kanwil XX Mataram
		Satker KPP Pratama Kupang	Kanwil XXI Kupang
30.	Kanwil DIP Papua dan Maluku	Satker Kanwil DIP Papua dan Maluku	Kanwil XXX Jayapura
		Satker KPP Pratama Ambon	Kanwil XXXI Ambon
31.	Kanwil DIP Wilayah Pajak Besar	Satker Kanwil DIP Wilayah Pajak Besar	Kanwil XI Jakarta

Lampiran II:1.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
< KANTOR PELAYANAN PAJAK>

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Penerimaan Pajak, antara Kepala Kepala Subbagian Umum *) yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Pengolahan Data dan Informasi*) yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak, masing-masing pada Kantor Pelayanan Pajak Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Hibah, Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

- 1. Rincian Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*);
- 2. Rincian SPMKP/SPMIB dan SP2D untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*); dan
- 3. Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).

Setelah dilakukan pencocokan data penerimaan pajak, pengembalian pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana tersebut diatas dengan data laporan keuangan, nilai Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp, jumlah pengembalian pajak sebesar Rp dan jumlah pengembalian imbalan bunga sebesar Rp sebagaimana terlampir. Selanjutnya selisih yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya rekonsiliasi, ditindaklanjuti oleh Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan membuat jurnal koreksi. Demikian, berita acara ini dibuat sebagai dokumen pendukung data Laporan Keuangan UAKPA Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Subbagian Umum

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II:1.1.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

**RINCIAN RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA**

KODE PERKIRAAN	URAIAN *)	RENCANA PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK **)	PERSENTASE
411125	PPH Pasal 25 Orang Pribadi			
411126	PPH Pasal 25 Badan			
411121	PPH Pasal 21			
411122	PPH Pasal 22			
411124	PPH Pasal 23			
411126	PPH Pasal 26			
411128	PPH Final dan Fiskal Luar Negeri			
411211	PPN Dalam Negeri			
411221	PPnBM dalam Negeri			
411311	Piutang PBB Pedesaan			
411312	Piutang PBB Perkotaan			
411313	Piutang PBB Perkebunan			
411314	Piutang PBB Kehutanan			
411315	Piutang PBB Pertambangan			
411411	Piutang BPHTB			
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya			
JUMLAH				

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh
**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

Lampiran II:1.1.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DAFTAR PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER
KANTOR PELAYANAN PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

MAP	JENIS PAJAK)	LAPORAN PENERIMAAN PAJAK **)					LAPORAN KEUANGAN (SAI)	SELISIH
		MPN	PEMOTONGAN SPM (ePayPoint)	DTP	VALAS	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)	(8)	(9=7-8)
411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi							
411126	PPh Pasal 25/29 Badan							
411121	PPh Pasal 21							
411122	PPh Pasal 22							
411124	PPh Pasal 23							
411126	PPh Pasal 26							
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri							
411211	PPN Dalam Negeri							
411221	PPnBM dalam Negeri							
411311	Piutang PBB Pedesaan							
411312	Piutang PBB Perkotaan							
411313	Piutang PBB Perkebunan							
411314	Piutang PBB Kehutanan							
411315	Piutang PBB Pertambangan							
411411	Piutang BPHTB							
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya							
JUMLAH								

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh
**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

Lampiran II:1.1.3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

RINCIAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN PAJAK DAN IMBALAN BUNGA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

NOMOR	JENIS PAJAK	SKPLB		SPMKP/SPMIB		SP2D		KETERANGAN
		NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	
A. PENGEMBALIAN PENDAPATAN (RESETITUSI)								
TOTAL								
B. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA								
TOTAL								

Lampiran II:1.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
< KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK>

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Penerimaan Pajak, antara Kepala Bagian Umum yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak, masing-masing pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Hibah, Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

- 1. Rincian Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember
- 2. 20X0*); Rincian SPMKP/SPMIB dan SP2D untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*); dan
- 3. Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).

Setelah dilakukan pencocokan data penerimaan pajak, pengembalian pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana tersebut diatas dengan data laporan keuangan, nilai Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp, jumlah pengembalian pajak sebesar Rp dan jumlah pengembalian imbalan bunga sebesar Rp sebagaimana terlampir.
Demikian, berita acara ini dibuat sebagai dokumen pendukung Laporan Keuangan UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kepala Subbagian Umum

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II:1.2.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

**RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA**

KODE PERKIRAAN	URAIAN *)	RENCANA PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK **)	PERSENTASE
411125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi			
411126	PPh Pasal 25 Badan			
411121	PPh Pasal 21			
411122	PPh Pasal 22			
411124	PPh Pasal 23			
411126	PPh Pasal 26			
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri			
411211	PPN Dalam Negeri			
411221	PPnBM dalam Negeri			
411311	Piutang PBB Pedesaan			
411312	Piutang PBB Perkotaan			
411313	Piutang PBB Perkebunan			
411314	Piutang PBB Kehutanan			
411315	Piutang PBB Pertambangan			
411411	Piutang BPHTB			
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya			
JUMLAH				

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh

**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

REALISASI PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

MAP	JENIS PAJAK *)	LAPORAN PENERIMAAN PAJAK **)					LAPORAN KEUANGAN (SAI)	SELISIH
		MPN	PEMOTONGAN SPM (ePayPoint)	DTP	VALAS	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)	(8)	(9=7-8)
411125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi							
411126	PPh Pasal 25 Badan							
411121	PPh Pasal 21							
411122	PPh Pasal 22							
411124	PPh Pasal 23							
411126	PPh Pasal 26							
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri							
411211	PPN Dalam Negeri							
411221	PPnBM dalam Negeri							
411311	Piutang PBB Pedesaan							
411312	Piutang PBB Perkotaan							
411313	Piutang PBB Perkebunan							
411314	Piutang PBB Kehutanan							
411315	Piutang PBB Pertambangan							
411411	Piutang BPHTB							
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya							
JUMLAH								

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh
**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

RINCIAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN PAJAK DAN IMBALAN BUNGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

NOMOR	JENIS PAJAK	SKPLB		SPMKP/SPMIB		SP2D		KETERANGAN
		NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	
A. PENGEMBALIAN PENDAPATAN (RESETITUSI)								
A.1	KPP 1							
A.2	KPP2							
A.3	KPP3							
....								
TOTAL								
B. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA								
B.1	KPP 1							
B.2	KPP 2							
B.3	KPP 3							
....								
TOTAL								

Lampiran II:1.3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK
Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi data Penerimaan Pajak, antara Kepala Bagian Keuangan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Kepala Sub Direktorat Administrasi dan Evaluasi Penerimaan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak, masing-masing pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Pendapatan dan Hibah, Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Penerimaan Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

1. Rincian Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*);
2. Rincian SPMKP/SPMIB dan SP2D untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*); dan
3. Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB untuk periode yang berakhir Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).

Setelah dilakukan pencocokan data penerimaan pajak, pengembalian pajak dan pemberian imbalan bunga sebagaimana tersebut diatas dengan data laporan keuangan, nilai Realisasi Penerimaan Pajak adalah sebesar Rp, jumlah pengembalian pajak sebesar Rp dan jumlah pengembalian imbalan bunga sebesar Rp sebagaimana rincian terlampir.

Demikian, berita acara ini dibuat sebagai dokumen pendukung Laporan Keuangan UAPPA-EI Direktorat Jenderal Pajak

Kepala Sub Direktorat Administrasi dan
Evaluasi Penerimaan, Direktorat Potensi,
Kepatuhan dan Penerimaan

Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Direktorat Jenderal

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II:1.3.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

**RINCIAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA**

KODE PERKIRAAN	URAIAN *)	RENCANA PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK **)	PERSENTASE
411125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi			
411126	PPh Pasal 25 Badan			
411121	PPh Pasal 21			
411122	PPh Pasal 22			
411124	PPh Pasal 23			
411126	PPh Pasal 26			
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri			
411211	PPN Dalam Negeri			
411221	PPnBM dalam Negeri			
411311	Piutang PBB Pedesaan			
411312	Piutang PBB Perkotaan			
411313	Piutang PBB Perkebunan			
411314	Piutang PBB Kehutanan			
411315	Piutang PBB Pertambangan			
411411	Piutang BPHTB			
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya			
JUMLAH				

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh
**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

REALISASI PENERIMAAN PAJAK BERDASARKAN DOKUMEN SUMBER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

MAP	JENIS PAJAK (*)	LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (**)					LAPORAN KEUANGAN (SAI)	SELISIH
		MPN	PEMOTONGAN SPM (ePayPoint)	DTP	VALAS	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)	(8)	(9=7-8)
411125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi							
411126	PPh Pasal 25 Badan							
411121	PPh Pasal 21							
411122	PPh Pasal 22							
411124	PPh Pasal 23							
411126	PPh Pasal 26							
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri							
411211	PPN Dalam Negeri							
411221	PPnBM dalam Negeri							
411311	Piutang PBB Pedesaan							
411312	Piutang PBB Perkotaan							
411313	Piutang PBB Perkebunan							
411314	Piutang PBB Kehutanan							
411315	Piutang PBB Pertambangan							
411411	Piutang BPHTB							
411619	Pajak Tidak Langsung Lainnya							
JUMLAH								

*) Rincian Jenis Pajak hanya sebagai contoh
**) Jumlah Penerimaan Pajak Bruto

RINCIAN PENGEMBALIAN PAJAK DAN IMBALAN BUNGA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA

NOMOR	JENIS PAJAK	SKPLB		SPMKP/SPMIB		SP2D		KETERANGAN
		NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	NOMOR	(RUPIAH)	
A. PENGEMBALIAN PENDAPATAN (RESETITUSI)								
A.1	Kantor Wilayah DJP 1							
A.1.1	KPP 1.1							
A.1.1	KPP 1.2							
A.2	Kantor Wilayah DJP 2							
A.2.1	KPP 2.1							
A.2.1	KPP 2.2							
A.3	Kantor Wilayah DJP 3							
A.3.1	KPP 3.1							
a.3.1	KPP 3.2							
.....								
TOTAL								
B. PEMBERIAN IMBALAN BUNGA								
B.1	Kantor Wilayah DJP 1							
B.1.1	KPP 1.1							
B.1.2	KPP 1.2							
B.2	Kantor Wilayah DJP 2							
B.2.1	KPP 2.1							
B.2.2	KPP 2.2							
B3	Kantor Wilayah DJP 3							
B.3.1	KPP 3.1							
B.3.2	KPP 3.2							
.....								
TOTAL								

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Piutang Pajak, antara Kepala Subbagian Umum yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Seksi Penagihan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak, masing-masing pada Kantor Pelayanan Pajak.....
Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan atau dokumen berupa Neraca dan Neraca Percobaan UAKPA Kantor Pelayanan Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

- 1. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).
- 2. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*).
- 3. Rincian Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0*) yang sedang diajukan pengurangan/pembetulan dan keberatan oleh Wajib Pajak.
- 4. Rincian Piutang Pajak yang telah Daluwarsa, yang diusulkan penghapusan dan dihapus dalam tahun 20X0.

Setelah dilakukan pencocokan data piutang pajak sebagaimana tersebut diatas dengan data piutang pajak dalam Laporan Keuangan, nilai Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *) adalah sebesar Rp, dengan nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp, piutang pajak yang daluwarsa sebesar Rp, piutang pajak diajukan penghapusan Rp, dan piutang pajak telah dihapuskan dalam tahun berjalan sebesar Rp serta terdapat nominal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan/pembetulan dan keberatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp sebagaimana rincian terlampir. Selanjutnya selisih yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya rekonsiliasi, ditindaklanjuti oleh Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan membuat jurnal koreksi.

Demikian, berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Penagihan

Kepala Subbagian Umum

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

Mengetahui,
Kepala Kantor,

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK XXXXXXXXX
PER 30-06-20X0 / 31-12-20X0 *)

KODE PERKIRAAN	URAIAN *)	LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK				NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		IDR (Rp)	USD (\$)	Rate **)	Jumlah (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
113125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi							
113126	PPh Pasal 25 Badan							
113121	PPh Pasal 21							
113122	PPh Pasal 22							
113124	PPh Pasal 23							
113127	PPh Pasal 26							
113128	PPh Pasal 4 (2)							
113131	PPN							
113141	PPnBM							
113151	Piutang PBB Pedesaan							
113152	Piutang PBB Perkotaan							
113153	Piutang PBB Perkebunan							
113154	Piutang PBB Kehutanan							
113155	Piutang PBB Pertambangan							
113157	Piutang BPHTB							
113172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya							
113173	Bunga Penagihan							
	TOTAL							

*) Coret yang tidak perlu
**) Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode akuntansi (per tanggal neraca)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR PIUTANG
PER 30 JUNI 20X0/31 DESEMBER 20X0 *)

(Rp: dalam rupiah; \$: dalam satuan US\$)

NO	JENIS PAJAK	UMUR PIUTANG (UT)							KETERANGAN
		≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
1	PPH Pasal 25 OP	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
2	PPH Pasal 25 Badan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
3	PPH Pasal 21	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
4	PPH Pasal 22	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
5	PPH Pasal 23	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
6	PPH Pasal 26	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
7	PPH Pasal 4(2)	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
8	PPN	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
9	PPnBM	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
10	Bunga Penagihan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
11	PKK	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
12	PBB Sektor Pedesaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
13	PBB Sektor Perkotaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
14	PBB Sektor Perkebunan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
15	PBB Sektor Perhutanan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
18	BPHTB	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
JUMLAH		Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUWARSA,
PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN DAN PIUTANG PAJAK
DIHAPUSKAN
PER 30 JUNI 20X0 / 31 DESEMBER 20X0 *)

NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN **)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PPH Pasal 25 OP	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
2	PPH Pasal 25 Badan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
3	PPH Pasal 21	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
4	PPH Pasal 22	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
5	PPH Pasal 23	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
6	PPH Pasal 26	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
7	PPH Pasal 4(2)	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
8	PPN	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
9	PPnBM	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
10	Bunga Penagihan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
11	PKK	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
12	PBB Sektor Pedesaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
13	PBB Sektor Perkotaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
14	PBB Sektor Perkebunan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
15	PBB Sektor Pehutanan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
16	PBB Sektor Pertambahan Non Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
18	BPHTB	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	
JUMLAH		Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	

*) Coret yang tidak perlu
**) Untuk periode yang berakhir pada akhir periode akuntansi

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN PIUTANG PAJAK YANG DIAJUKAN KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI
PER 30 JUNI 20X0 / 31 DESEMBER 20X0 *)

NO	JENIS PAJAK	SENGKETA PAJAK					KETERANGAN
		PENGURANGAN /PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PPH Pasal 25 OP	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
2	PPH Pasal 25 Badan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
3	PPH Pasal 21	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
4	PPH Pasal 22	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
5	PPH Pasal 23	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
6	PPH Pasal 26	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
7	PPH Pasal 4(2)	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
8	PPN	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
9	PPnBM	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
10	Bunga Penagihan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
11	PKK	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
12	PBB Sektor Pedesaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
13	PBB Sektor Perkotaan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
14	PBB Sektor Perkebunan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
15	PBB Sektor Pehutanan	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
16	PBB Sektor Pertambahan Non Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
17	PBB Sektor Pertambahan Migas	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
18	BPHTB	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		
JUMLAH		Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$	Rp US\$		

*) Coret yang tidak perlu

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Piutang Pajak antara Kepala Bagian Umum yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak, masing-masing pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan atau dokumen berupa Neraca dan Neraca Percobaan UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

- 1. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *).
- 2. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *).
- 3. Rincian Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *) yang sedang diajukan pengurangan/pembetulan, keberatan dan banding oleh Wajib Pajak.
- 4. Rincian Piutang Pajak yang telah Daluwarsa, yang diusulkan penghapusan dan dihapuskan dalam tahun 20X0.

Setelah dilakukan pencocokan data piutang pajak sebagaimana tersebut di atas dengan data piutang pajak di neraca dan atau neraca percobaan, nilai Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *) adalah sebesar Rp, dengan nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp, piutang pajak yang daluwarsa sebesar Rp, piutang pajak diajukan penghapusan Rp, dan piutang pajak telah dihapuskan dalam tahun berjalan sebesar Rp serta terdapat nominal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan/pembetulan dan keberatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp sebagaimana rincian terlampir. Selanjutnya, selisih yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya rekonsiliasi, ditindaklanjuti oleh Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan klarifikasi nilai piutang pajak tersebut kepada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
Demikian, berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak

Kepala Bagian Umum

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

Mengetahui,
Kepala Kantor,

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....

**RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK XXXXXXXXX
PER 30-06-20X0 / 31-12-20X0 *)**

KODE PERKIRAAN	jenis pajak	LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK				NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		IDR (Rp)	USD (\$)	Rate **)	Jumlah (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
113125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi							
113126	PPh Pasal 25 Badan							
113121	PPh Pasal 21							
113122	PPh Pasal 22							
113124	PPh Pasal 23							
113127	PPh Pasal 26							
113128	PPh Pasal 4 (2)							
113131	PPN							
113141	PPnBM							
113151	Piutang PBB Pedesaan							
113152	Piutang PBB Perkotaan							
113153	Piutang PBB Perkebunan							
113154	Piutang PBB Kehutanan							
113155	Piutang PBB Pertambangan							
113157	Piutang BPHTB							
113172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya							
113173	Bunga Penagihan							
TOTAL								

*) Coret yang tidak perlu
**) Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode akuntansi (per tanggal neraca)

Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

info@peraturanpajak.com

Lampiran II:2.2.2.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP								
RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR PIUTANG PER 30 JUNI 20X0/31 DESEMBER 20X0*)								
(Rp dalam satuan ribuan \$ 000)								
NO	JENIS PAJAK	UMUR PIUTANG (UT)						JUMLAH
		≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	
1	KPP A	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2	KPP B	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
3	KPP C	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4	KPP D	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
5	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
7	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
9	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
11	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
12	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
13	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
15	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
17	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18	KPP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
JUMLAH		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
*) Dalam rangkai ini per...								

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.....						
RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUWARSA, PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN DAN PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN PER 30 JUNI 2010/31 DESEMBER 2010 *)						
NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN **)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PPH Pasal 25 OP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
2	PPH Pasal 25 Badan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
3	PPH Pasal 21	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
4	PPH Pasal 22	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
5	PPH Pasal 23	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
6	PPH Pasal 26	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
7	PPH Pasal 4 (2)	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
8	PPN	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
9	PPnBM	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
10	Bunga Penagihan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
11	PKK	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
12	PBB Sektor Pedesaan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
13	PBB Sektor Perkotaan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
14	PBB Sektor Perkebunan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
15	PBB Sektor Perhutanan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
18	BPHTB	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
JUMLAH		RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
*) Coret yang tidak perlu **) Untuk periode yang berakhir pada akhir periode akuntansi						

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP.....						
RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUWARSA, PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN DAN PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN PER 30 JUNI 2010/31 DESEMBER 2010 *)						
NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN **)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP A	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
2	KPP B	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
3	KPP C	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
4	KPP D	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
5	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
6	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
7	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
8	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
9	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
10	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
11	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
12	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
13	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
14	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
15	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
16	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
17	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
18	KPP	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$
JUMLAH		RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
*) Coret yang tidak perlu) Untuk periode yang berakhir pada akhir periode akuntansi						

Lampiran II:2.2.4.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP						
RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUWARSA, PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN DAN PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN PER 30 JUNI 20X0 / 31 DESEMBER 20X0 ¹⁾						
NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN ²⁾	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KPP A	Rp	Rp	Rp	Rp	
2	KPP B	US\$	US\$	US\$	US\$	
3	KPP C	Rp	Rp	Rp	Rp	
4	KPP D	US\$	US\$	US\$	US\$	
5	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
6	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
7	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
8	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
9	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
10	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
11	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
12	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
13	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
14	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
15	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
16	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
17	KPP	Rp	Rp	Rp	Rp	
18	KPP	US\$	US\$	US\$	US\$	
JUMLAH		Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	
¹⁾ Data yang tidak perlu. ²⁾ Jumlah periode yang berakhir pada akhir periode akuntansi.						

Lampiran II:2.2.4.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP							
RINCIAN PIUTANG PAJAK YANG DIAJUKAN KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI PER 30 JUNI 20X0/ 31 DESEMBER 20X0 ^{*)}							
NO	JENIS PAJAK	SINGKETA PAJAK					KETERANGAN
		PENGURANGAN /PLAMDETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PPH Pasal 25 OP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
2	PPH Pasal 25 Badan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
3	PPH Pasal 21	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
4	PPH Pasal 22	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
5	PPH Pasal 23	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
6	PPH Pasal 24	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
7	PPH Pasal 4(2)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
8	PPN	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
9	PPnBM	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
10	Duga Penagihan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
11	PKK	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
12	PDB Sektor Pedesaan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
13	PDB Sektor Perkotaan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
14	PDB Sektor Perkebunan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
15	PDB Sektor Perikanan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
16	PDB Sektor Pertambangan Non Migas	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
17	PDB Sektor Pertambangan Migas	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
18	BPHTB	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
JUMLAH		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
*) Coret yang tidak berlaku							

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diselenggarakan rekonsiliasi Data Piutang Pajak antara Kepala Bagian Keuangan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kepala Sub Direktorat Penagihan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak, masing-masing pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan atau dokumen berupa Neraca dan Neraca Percobaan UAPPA-EI Direktorat Jenderal Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *). Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak menyampaikan data dan atau dokumen, berupa :

1. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *).
2. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *).
3. Rincian Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *) yang sedang diajukan pengurangan/pembetulan, keberatan, banding dan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak.
4. Rincian Piutang Pajak yang telah Daluwarsa, yang diusulkan penghapusan dan dihapuskan dalam tahun 20X0.

Setelah dilakukan pencocokan data piutang pajak sebagaimana tersebut di atas dengan data piutang pajak di neraca dan atau neraca percobaan, nilai Piutang Pajak Per 30 Juni 20X0/31 Desember 20X0 *) adalah sebesar Rp, dengan nilai penyisihan piutang pajak sebesar Rp, piutang pajak yang daluwarsa sebesar Rp, piutang pajak diajukan penghapusan Rp, dan piutang pajak telah dihapuskan dalam tahun berjalan sebesar Rp serta terdapat nominal surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan/pembetulan dan keberatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp sebagaimana rincian terlampir. Selanjutnya, selisih yang terjadi sebagai akibat dilaksanakannya rekonsiliasi, ditindaklanjuti oleh Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan dengan melakukan klarifikasi nilai piutang pajak tersebut kepada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian, berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Sub Direktorat Penagihan Pajak

Kepala Bagian Keuangan

<Nama>
<NIP>

<Nama>
<NIP>

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II:2.3.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK PER 30-06-20X0 / 31-12-20X0 ^{*)}								
KODE PERKIRAAN	JENIS PAJAK	LAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG PAJAK				NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		IDR (Rp)	USD (\$)	Rata ^{*)}	Jumlah (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
119125	PPh Pasal 25 Orang Pribadi							
119126	PPh Pasal 25 Badan							
119121	PPh Pasal 21							
119122	PPh Pasal 22							
119124	PPh Pasal 23							
119127	PPh Pasal 26							
119128	PPh Pasal 4 (2)							
119131	PPN							
119141	PPnBM							
119151	Piutang PBB Pedesaan							
119152	Piutang PBB Perkotaan							
119153	Piutang PBB Perkebunan							
119154	Piutang PBB Kehutanan							
119155	Piutang PBB Pertambangan							
119157	Piutang BPHTB							
119172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya							
119178	Bunga Penagihan							
	Total							
^{*)} Coret yang tidak perlu.								
^{**)} Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode akuntansi.								

Lampiran II:2.3.2.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK									
RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR PIUTANG PER 30 JUNI 20X0/31 DESEMBER 20X0 ¹⁾									
(Rp, dalam jutaan, 5. dalam satuan 1/100)									
NO	JENIS PAJAK	UMUR PIUTANG (DIT)						Jumlah	KETERANGAN
		< 1 Dth	1 Dth <= DIT < 2 Dth	2 Dth <= DIT < 3 Dth	3 Dth <= DIT < 4 Dth	4 Dth <= DIT < 5 Dth	> 5 Dth		
1	PPh Pasal 25 DP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2	PPh Pasal 25, Besok	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
3	PPh Pasal 21	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4	PPh Pasal 22	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
5	PPh Pasal 23	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
6	PPh Pasal 26	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
7	PPh Pasal 421	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
8	PPN	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
9	PPN-M2	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
10	Bunga Pinjaman	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
11	PAK	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
12	PBB Sektor Pajakair	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
13	PBB Sektor Pertambangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
14	PBB Sektor Pertambangan	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
15	PBB Sektor Pertambangan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
18	UMKMS	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
Jumlah		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jumlah		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

Lampiran II:2.3.2.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

RINCIAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN UMUR PIUTANG PER 30 JUNI 20X0/31 DESEMBER 20X0 ¹⁾										
KODE		NOMOR PIUTANG		UMUR PIUTANG (D)		Jumlah		M. T. KASIHAN		REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		< 5 Tns	5 Tns < 10 Tns	10 Tns < 15 Tns	15 Tns < 20 Tns	20 Tns < 25 Tns	25 Tns < 30 Tns	30 Tns < 35 Tns	35 Tns < 40 Tns	
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
010	Kantor Wilayah DJP Pangreh Aceh	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
020	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
030	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
040	Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
050	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
060	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
070	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
080	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
090	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
140	Kantor Wilayah DJP Banten	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jumlah		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	

Lampiran II:2.3.3.1
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE- /PJ/2009
 Tanggal : Juni 2009
 Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
 Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUWARSA,
PIUTANG PAJAK DIUSULKAN PENGHAPUSAN DAN PIUTANG PAJAK
DIHAPUSKAN
PER 30 JUNI 20X0 / 31 DESEMBER 20X0¹⁾

NO	JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUWARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN ²⁾	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PPH Pasal 25 OP	Rp	Rp	Rp	Rp	
2	PPH Pasal 25 Bulatan	US\$	US\$	US\$	US\$	
3	PPH Pasal 21	Rp	Rp	Rp	Rp	
4	PPH Pasal 22	US\$	US\$	US\$	US\$	
5	PPH Pasal 23	Rp	Rp	Rp	Rp	
6	PPH Pasal 26	US\$	US\$	US\$	US\$	
7	PPH Pasal 4(2)	Rp	Rp	Rp	Rp	
8	PPN	US\$	US\$	US\$	US\$	
9	PPHBM	Rp	Rp	Rp	Rp	
10	Bunga Pinagihan	US\$	US\$	US\$	US\$	
11	PKK	Rp	Rp	Rp	Rp	
12	PDB Sektor Peternakan	US\$	US\$	US\$	US\$	
13	PDB Sektor Perikanan	Rp	Rp	Rp	Rp	
14	PDB Sektor Pertambangan	US\$	US\$	US\$	US\$	
15	PDB Sektor Perhutanan	Rp	Rp	Rp	Rp	
16	PDB Sektor Pertambangan Non Migas	US\$	US\$	US\$	US\$	
17	PDB Sektor Pertambangan Migas	Rp	Rp	Rp	Rp	
18	BPHPD	US\$	US\$	US\$	US\$	
Jumlah		Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	

¹⁾ Contoh yang tidak berlaku
²⁾ Untuk periode yang berakhir pada akhir periode keuangan

Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

*) Untuk yang lebih perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							
RINCIAN PIUTANG PAJAK YANG DIAJUKAN KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI PER 30 JUNI 20X0/ 31 DESEMBER 20X0 ¹⁾							
NO	JENIS PAJAK	SINGKETA PAJAK					KETERANGAN
		PENGARANGAN PERMUTULAN	KETERANGAN	BANDING	PENURILAHAN KID MDALE	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PPh Pasal 20 OP	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
2	PPh Pasal 25 Badan	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
3	PPh Pasal 21	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
4	PPh Pasal 22	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
5	PPh Pasal 23	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
6	PPh Pasal 26	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
7	PPh Pasal 62	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
8	PPh	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
9	PPhBM	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
10	Bunga Penangihan	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
11	PPhK	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
12	PDB Sektor Pedesaan	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
13	PDB Sektor Perkotaan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
14	PDB Sektor Perkebunan	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
15	PDB Sektor Perikanan	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
16	PDB Sektor Pertambangan Non Migas	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
17	PDB Sektor Pertambangan Migas	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
18	BPHTB	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
JUMLAH		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

¹⁾ Coret yang tidak berlaku

Lampiran II:2.3.4.2
 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE- /PJ/2009
 Tanggal : Juni 2009
 Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
 Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RINCIAN PIUTANG PAJAK YANG DIAJUKAN KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI PER 30 JUNI 20X0/ 31 DESEMBER 20X0*)							
NO	JENIS PAJAK	SENKETA PAJAK					KETERANGAN
		PENGURANGAN PEMBETULAN	KEBERATAN	BANDING	PENINJAUAN KEMBALI	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
010	Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
020	Kantor Wilayah DJP Sumatera I	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
030	Kantor Wilayah DJP Sumatera II	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
040	Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
050	Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
060	Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
070	Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
080	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
090	Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
100	Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
110	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
120	Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
130	Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	

140	Kantor Wilayah DJP Banten	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
150	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
160	Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
170	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
180	Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
190	Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
200	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
210	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
220	Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
230	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	
JUMLAH		RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	RP US\$	

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II:3.1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

REKONSILIASI BELANJA MODAL DAN PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA

NOMOR	KODE SATKER	BELANJA MODAL		PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA							SELISIH (4-11)
		NAMA SATUN KERJA	RUPIAH (SPM)	101	105	202	206	502	503	JUMLAH (5+6+7+8+9)	
				PEMBELIAN	PEMBELIAN PENGANGGARAN	PENGEMBANGAN	PENGEMBANGAN RENDAH	PENGEMBANGAN RENDAH	PENGEMBANGAN RENDAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	111111	KPP A									
2	111112	KPP B									
3	111113	KPP C									
4	111114	KPP A									
5	111115	KPP B									
JUMLAH			0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Selisih yang terjadi diberikan penjelasan

a.n Kepala kantor
Kepala Sub Bagian Umum

(.....)
NIP

Lampiran II:3.2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

REKONSILIASI BELANJA MODAL DAN PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA

NOMOR	BELANJA MODAL			PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA							SELISIH (4-11)
	KODE KANWIL	NAMA KANTOR WILAYAH DJP	JUMLAH (SUM)	301	305	307	306	302	303	JUMLAH 301-303+36	
				PEMBELIAN PENGADAAN	PEMBELIAN PEMBELIAN	PEMBELIAN PEMBELIAN	PEMBELIAN PEMBELIAN	PEMBELIAN PEMBELIAN	PEMBELIAN PEMBELIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	000	Satuan Kerja Pusat									
2.	010	Kantor Wilayah DJP Mangrove Aceh Darussalam									
3.	020	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I									
4.	030	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II									
...	...	...									
12	310	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar									
		JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Selisih yang terjadi diberikan penjelasan

a.n Kepala kantor
Kepala Sub Bagian Umum

(.....)
NIP

Lampiran II:3.3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- /PJ/2009
Tanggal : Juni 2009
Tentang : Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

REKONSILIASI BELANJA MODAL DAN PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA

REALISASI BELANJA MODAL								PEMBELIAN (MUTASI) BARANG MILIK NEGARA								SELISIH * (B-15)
NOMOR	BAS	URAIAN BAS	SPM		SP2D		RUPIAH (SPM)	101	105	202	206	302	305	JUMLAH (0-10-1-10-10-10)		
			NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL		PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN			
								PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN	PEMBELIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	5.31	Bel Modal Tanah														
	5.32	Bel Modal Peralatan dan Mesin														
	5.33	Bel Modal Gedung dan Bangunan														
	5.34	Bel Modal Jalan, Jembatan dan Jembatan														
	5.35	Bel Modal Pemeliharaan yg Diperkirakan														
	5.36	Bel Modal Risk Lainnya														
JUMLAH							0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Selisih yang terjadi diberikan penjelasan

Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Umum

(.....)
NIP

(.....)
NIP